

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**

**(Studi Pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung
Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

INTAN PALUPI

NPM : 1621020510

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2017 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH**

(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

INTAN PALUPI

NPM : 1621020510

Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I: Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Pembimbing II: Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat menurunkan derajat kesehatan seseorang, selain itu pula dapat merusak moral masyarakat di suatu daerah bahkan masyarakat di suatu negara. Pengaturan mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol tidak luput dari system peraturan perundang-undangan disetiap lapisan, baik di peraturan tingkat nasional (Undang-Undang) ataupun tingkat daerah (Peraturan Daerah). Pengendalian dan Pengawasan mengenai Minuman beralkohol merupakan permasalahan penting di daerah ortonom karena meyangkut kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Khususnya, menetapkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, guna menekan dan meminimalisir keberadaan minuman beralkohol agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten lampung Tengah terjamin. Faktanya meski Pemerintah Kabupaten lampung Tengah telah mengeluarkan Peraturan atas pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol hal ini belum dapat dikatakan berhasil karena masih terdapat banyak kendala dengan tingginya angka pengguna dan bebasnya penjualan minuman beralkohol, sehingga fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain; Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Pandangan siyasah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 di Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di dalam lingkungan masyarakat, penelitian ini menggunakan metode interview sebagai metode pokok dan dokumentasi sebagai metode pendukung.

Adapun tujuan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Serta berdasarkan pola pandang siyasah dusturiyah tidak memberikan toleransi pada penjualan minuman beralkohol yang dimana dalam hukum islam tidak mengkategorikan besar kecilnya kadar alkohol yang di larang.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Intan Palupi

NPM : 1621020510

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : *Syari'ah*

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
Nomor 08 Tahun 2017 Dalam Perspektif Siyasah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan referensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Agustus

Saya yang menyatakan,



Intan Palupi

NPM. 1621020510



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama:

Nama : Intan Palupi
NPM : 1621020510
Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Tengah Nomor 08 Tahun 2017 dalam Perspektif Siyasah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam siding munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H
NIP.1958020119866031002

Marwin, S.H., M.H
NIP.19750129200003100

Mengetahui
Ketua Jurusan

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 dalam Perspektif Siyasa** Disusun oleh: **Intan Palupi, NPM : 1621020510, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah).**

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal Selasa, 13 Oktober 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : H. Rohmat, S.Ag, M.H.I.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.H.Ag.

(.....)

Penguji I : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

(.....)

Penguji II : Drs. H. ChaidirNasution, M.H

(.....)

Penguji III : Marwin, S.H., M.H

(.....)

**Mengetahui,
Fakultas Syariah**



**Dr. H. Chairuddin, M.H.
NIP. 16210221993031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء : ٥٩)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih utama akibatnya. "

(QS. An-nisa/4:59)



PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridha-Mu ya Allah, kupersembahkan karya tulis sederhana ini untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayah Solihun dan Ibu Sukinah yang telah membesarkan Intan sejak waktu kecil dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta tanpa rasa lelah dan letih, yang selalu mendoakan setiap saat dan mendukung setiap langkah perjuangan Intan sampai akhirnya bisa menyelesaikan skripsi dan kuliah Intan tepat pada waktunya. Skripsi dan kelulusan ini Intan persembahkan sebagai hadiah terindah untuk Ayah dan Ibuku tercinta. Mamasku tercinta M. Agung Prasetyo dan Mbaku Siti Fatimah kalian semua semangatku untuk segera menyelesaikan skripsi dan kuliah ini tepat pada waktunya, terimakasih selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah perjuanganku. Terimakasih juga kepada Anggi yang selalu membantu mensupportku dalam pengerjaan skripsi ini. Sahabat-sahabatku Bidayatu Qurotu Ayni, Silvia Lurenza, Tiya Eka, Siti Miftahul, Hani, Yeni Optaria, Kristin Juliana dan semua yang tidak dapat Intan sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kalian yang selalu memotivasi, menghibur, dan mengiringiku baik dalam keadaan suka maupun duka. Teman-temanku satu angkatan 2016 di Siyasah F terimakasih untuk kalian semua yang telah mengisi masa-masa kuliahku dengan penuh warna. Serta, Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Intan Palupi, dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 24 November 1998, merupakan bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Solihun dan Ibu Sukinah.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Adi Jaya yang diselesaikan pada tahun 2010, kemudian melanjutkan studi di SMPN 4 Terbanggi Besar yang diselesaikan pada tahun 2013, dan melanjutkan studi di SMAN 1 Seputih Agung yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada 2016 kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Bandar Lampung, 10 Agustus 2020,

Intan Palupi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M. Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H dan Marwin, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu dibangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater UIN Raden Intan Lampung tecinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2020,

Intan Palupi



DAFTAR ISI

Halaman

COVER JUDUL LUAR.....	i
COVER JUDUL DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	7
H. Metode Penelitian.....	8

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i>	16
1. Definisi <i>Fiqh Siyasah</i>	16
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	18
3. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i> dalam Hukum Islam	20
B. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	21
1. Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i>	21
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	24
3. Kedudukan <i>Siyasah Dusturiyah</i>	27
C. Perda Sebagai Produk <i>Ulil Amri</i>	28
D. Islam dan Minuman Beralkohol	32
E. TinjauanPustaka	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah	
1. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja	46
2. Pengertian Nama Satuan Polisi Pamong Praja.....	48
3. Visi, Misi, dan Sasaran	49

4. Struktur Organisasi	52
5. Tugas Pokok dan Fungsi	53
B. Kategori Minuman Beralkohol	65
C. Penerapan Perda Kabupaten Lampung Tengah No 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ..	71
D. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peraturan Daerah	74
E. Prosedur Dalam Melakukan Razia Minuman Beralkohol .	75
F. Minuman Beralkohol Yang Dapat Di Edarkan.....	78
G. Tolak Ukur Ketaatan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah Sebelum Adanya Perda dan Sesudah Adanya Perda.....	79

BAB IV ANALISI DATA

A. Implementasi Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol ..	82
B. Analisis <i>Siyasah</i> tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN..... 95

Lampiran 1	Izin Riset
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Dokumen Pendukung
Lampiran 3	Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen)
Lampiran 4	Kartu Konsultasi
Lampiran 5	Hasil Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam proposal yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Siyasah (Studi Pada Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah)** yaitu sebagai berikut :

1. Impelementasi

Implementasi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti pelaksanaan penerapan adalah pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang di sepakati dulu¹. Implementasi yang dimaksud dalam judul ini adalah tentang Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Lampung Tengah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan persetujuan bersama Bupati Lampung Tengah yang disahkan oleh Mustafa dan diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 21 Agustus

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 529.

2017 oleh Sekertaris Desa Adi Erlansyah tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang sebagaimana diterapkan dalam masyarakat Kabupaten Lampung Tengah untuk menghasilkan anggota masyarakat yang bermoral.

3. Pengendalian adalah penahanan pembatasan penahanan.
4. Pengawasan adalah penelitian atau pengamatan yang tertuju pada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian.²
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.³
6. Perspektif adalah sudut pandang atau (pandangan) pendapat.
7. *Siyasah*

Siyasah menurut terminologi berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* juga berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariat Islam.⁴

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 dalam Perspektif

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 49.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Pasal 1 ayat (7).

⁴ Dr. H. Muhammadong, M. Ag, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Edukasi Mitra Grafika 2017), h.25.

Siyasah (Studi Pada Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah)”, adalah bagian dalam perspektif *siyasah* tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Studi pada Satpol PP Kabupaten Lampung Tengah).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah ini sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif

- a. Berdasarkan fakta yang terlihat bahwa masih ada masyarakat di Lampung Tengah kurang baik dalam memahami peraturan baik aturan-aturan, larangan-larangan yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai masyarakat.
- b. Maraknya minuman beralkohol di masyarakat, bisa jadi karena implementasi Perda No 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang belum maksimal.

2. Alasan subjektif

- a. Permasalahan yang dipilih oleh penulis sesuai dengan jurusan yang peneliti tekuni yaitu Hukum Tata Negara.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang Masalah

Modernisasi sebagai tonggak awal kemajuan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Modernisasi yang membawa dampak mental dalam berbagai bidang nilai kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, dan modernisasi merupakan faktor sosial ekonomi baru yang akan memberikan dampak pengaruh dalam bidang kesehatan.

Faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang tidak sehat diantaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah tangga, kekerasan anak, perokok berat, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba oleh remaja. Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita yaitu penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan maka bencana akan terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.

Melihat dari banyaknya dampak negatif akibat minuman beralkohol tersebut maka adanya Perda pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan untuk membatasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut dengan cara melakukan pengendalian serta pengawasan baik itu dipusat atau daerah untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol. Dampak negatif

dari minuman beralkohol dapat dilihat melalui media cetak ataupun elektronik dan kian hari semakin banyak kasus-kasus yang terjadi khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.

Sebagai contoh yaitu kasus seorang pemuda di Lampung Tengah yang tega ingin memperkosa nenek-nenek yang terjadi akibat pengaruh miras. Pelaku memiliki hasrat seksual setelah mengkonsumsi miras tersebut, pelaku memakai modus meminta segelas air putih dengan alasan kalau dia haus.⁵ Kemudian contoh lainnya yaitu seorang anak di Lampung Tengah tega menganiaya ibu kandung hingga dirawat di rumah sakit setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku memukuli ibunya karena ingin meminta uang dan pada waktu kejadian pemukulan tersebut, pelaku sedang dibawah minuman keras.⁶

Berdasarkan hal ini kemudian penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang baik diterapkan dalam masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu penulis mengangkat judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 dalam Perspektif *Siyasah* (Studi Pada Satpol PP Lampung Tengah).”

⁵ Akibat Pengaruh Minuman Keras Seorang Pemuda di Lampung Tengah mau Perkosa Nenek-nenek (On-line), tersedia di: <https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2019/08/14/> (18 Januari 2020).

⁶ Mabuk Minuman Keras Seorang Anak di Lampung Tengah Tega Aniaya Ibu Kandung Hingga Dirawat Di Rumah Sakit (On-line), tersedia di: <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/13/> (18 Januari 2020).

D. Fokus Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian berguna untuk memberikan batasan agar penelitian terfokus pada masalah penelitian yang akan ditelaah. Sehingga peneliti akan lebih mudah dan fokus pada penelitian yang akan dilaksanakan yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Perspektif *Siyasah* (Studi Pada Satpol PP Lampung Tengah).

Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada permasalahan yang dibahas pada latar belakang masalah yang dijelaskan secara rinci dan ringkas kedalam identifikasi masalah. Jadi, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah menjabarkan mengenai bagaimana penerapan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 08 Tahun 2017, dan dilihat dari perspektif *siyasah*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka beberapa yang menjadi rumusan masalah menjadi fokus bahasan peneliti adalah :

1. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Lampung Tengah?

2. Bagaimana pandangan *siyash* tentang penerapan Perda Kabupaten Lampung Tengah?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Perda Kabupaten Lampung Tengah No 08 Tahun 2017 dalam mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
2. Untuk mengetahui pandangan *siyash* tentang penerapan Perda Kabupaten Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan adalah:

1. Alasan Objektif

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui penerapan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 dan mampu meguraikan tentang bagaimana pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut.

2. Alasan Subjektif

Penelitian ini penulis harapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh pengalaman dan daya kritis penulis dalam hal pengembangan diri dan studi ketatanegaraan serta hasil riset ini dapat menjadi kontribusi bagi penelitian mendatang. Selain itu peneitian ini bermanfaat bagi penulis

sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas *Syariah* dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Untuk keperluan penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan langsung didalam lingkungan masyarakat.⁷ Disini penulis akan terjun ke lapangan dimana akan meneliti Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan

⁷Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) cet. 4, h. 156.

kualitatif dalam penelitian ini dengan, mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.⁸

Dalam hal ini penelitian ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya penerapan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Jenis dan sumber data penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen untuk keperluan penelitian yang dimaksud dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan survey lapangan menggunakan data pengumpulan data. Dalam hal

⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 304.

ini peneliti mengumpulkan data yang terkait termasuk juga hasil wawancara dengan responden mengenai penerapan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol didapatkan dari Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah dan anggota Satpol PP, dan pedagang serta peminum minuman beralkohol sebagai data pembeding.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data atau informasi yang diambil dengan bantuan bermacam-macam materil yang terdapat dalam kepustakaan, dengan ini maka dapat dikumpulkan data-data dengan membaca literature-literatur, buku-buku, referensi serta peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁹

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan adalah teknik yang paling penting dalam penelitian. Karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data maka metode yang digunakan adalah:

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu

⁹*Ibid.*

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai.¹⁰ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, antara peneliti dengan sumber data maupun pihak satpol PP Kabupaten Lampung Tengah sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini merupakan metode pelengkap untuk membuktikan data yang diperoleh melalui observasi mengenai penerapan Perda Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

Sumber data wawancara diperoleh dari narasumber yang akan diwawancara yaitu Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, 2 (dua) anggota Satpol PP yang merazia, 3 (tiga) pedagang yang menjual minuman beralkohol dan 2 (dua) peminum minuman beralkohol di Bandar Jaya.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

¹⁰Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 80-81.

transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.¹¹ Dalam pelaksanaannya penulis mengadakan pencatatan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian. Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan penerapan Perda Nomor 08 Tahun 2017 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian.¹² Menurut Sugarsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Penelitian yang dilakukan menentukan unit analisis yang menunjukan siapa mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Karakteristik yang dimaksud adalah variable yang menjadi perhatian peneliti. Adapun yang menjadi populasi dalam peneitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Tengah yang terlibat dalam operasi razia minuman beralkohol.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Secara teknis dalam penarikan sampel, penulis

¹¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 360.

¹² *Ibid.*

menggunakan teknik *Purposif Sampling*. Cara ini dilakukan dengan mewawancarai jumlah sampel yang sesuai dengan penulis butuhkan. Sampel data yang akan dianalisis ini adalah 8 orang yang terdiri dari; 1 Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, karena merupakan sumber utama untuk mengetahui bidang kerja dari penegakan hukum yakni pengawasan berjalannya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan data analisis pembahasan implementasi peraturan daerah yang diteliti, dan 2 (dua) anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari pelaksana penertiban Peraturan daerah tersebut, 3 (tiga) pedagang yang menjual minuman beralkohol sebagai sampling dari penjual dan/atau bagian dari bagian sasaran penertiban perda tersebut dan 2 (dua) peminum minuman beralkohol di Bandar Jaya sebagai pelaku atau sebagai bagian dari data sekunder terhadap analisis Peraturan daerah tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu bersumber dari Al-Qur'an

dan hadis, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti.

- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.¹³
- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁴

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami.¹⁵ Analisis penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dengan cara mendapatkan data tertulis, maupun lisan dari para responden¹⁶, dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁷ Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Penulis juga menggunakan pendekatan deduktif dan atau induktif. Pendekatan deduktif dilaksanakan jika peneliti secara langsung menerapkan yang sedang diamati ke dalam

¹³Lexy John, Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Kosda, 2001), h. 161.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004), Cet.I, h. 126.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan....*, h.127.

kategori tertentu, sedangkan pendekatan induktif yaitu dimulai dari yang khusus, dengan penggunaan indikator dan berakhir dengan konsep.¹⁸ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



¹⁸Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 387.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep *Fiqh Siyasah*

1. Definisi *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyâsah berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua adalah *al-siyasi* kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Secara istilah, menurut ulama usul, kata *fiqh* yaitu mengerti hukum-hukum *syariat* yang sebangsa amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedangkan *al-siyasi* secara bahasa memiliki arti mengatur. Sedangkan kata *mashdar*-nya yaitu *siyasah* itu secara bahasa bermakna bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya.¹⁹

Ahmad Djazuli berpendapat bahwa *siyasah* berasal dari kata: *sasa –yasuusu – siyasatan*, yang berarti sama dengan kata, *dabbara-yudabbiru-tadbiiran* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan. Secara harfiah kata *as-Siyasah* yaitu: pemerintahan, pengambilan suatu keputusan, pembuatan suatu kebijakan, pengawasan, pengurusan, dan arti lainnya. *Al-Siyasah* juga dapat diartikan "memimpin sesuatu dengan cara yang dapat membawa suatu kemaslahatan bersama".²⁰

Beni Ahmad Saebani mengutip pendapat dari Quraisy Shihab, berpendapat bahwa *siyasah* memiliki arti yang sama dengan 'Politik' yang dimana terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang politik yang dapat

¹⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 23.

²⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Cet ke-3, h. 17.

ditemukan pada ayat-ayat yang berasal dari kata hukum. Awalnya kata itu memiliki arti "menghalang-halangi atau melarang" dengan maksud perbaikan. Dari asal kata yang sama lalu terbentuklah kata "*hikmah*" yang pada awalnya berarti "kendali". Makna tersebut sama dengan makna kata "*sasa-yasuusu-siasah*" yang berarti mengendalikan serta cara pengendalian.²¹

Pendapat dari Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa *Siyasah* merupakan Undang-Undang yang diletakkan guna memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur suatu keadaan. Pengertian lain *Siyasah* dalam arti *fiqh* merupakan suatu perbuatan yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kerusakan meskipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak mewahyukannya. Pengertian ini dikemukakan Ibnu Qayyim yang dikutip dari Ibnu 'Aqil. Pengertian lain juga dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahantsi yang mengatakan bahwa *Siyasah* merupakan kepengurusan kepentingan manusia yang sesuai dengan *syara*.²²

Siyasah ada yang bercorak kepada definisi umum tanpa melihat nilai-nilai *syari'at* agama walaupun tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan agama. Corak ini dikenal dengan istilah *Siyasat Wadh'iyyat* yang berarti *siyasah* yang berdasarkan kepada pengalaman sejarah, adat masyarakat, dan hasil pemikiran dari manusia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Corak selanjutnya yaitu corak yang

²¹ *Ibid.*

²² Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1), 47-63.

berorientasi kepada nilai-nilai wahyu atau *syari'at*, corak ini dikenal dengan istilah *Siyasah Syari'iyah* atau *Fiqh Siyasah*, yaitu *siyasah* yang berasal dari pemikiran manusia yang berlandaskan kepada etika agama serta moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum dari *syari'at* dalam mengatur kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.²³

Ahmad Djazuli berpendapat bahwa *siyasah (fiqh siyasah)* yang mengutip dari berbagai pengertian di antaranya adalah, *Siyasah* merupakan suatu kemaslahatan untuk umat manusia dengan memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, baik itu di dunia maupun di akhirat. Asal muasal *siyasah* yaitu daripada Nabi, baik secara khusus maupun umum, serta baik secara lahir maupun bathin. *Siyasah* lahir dari para pemegang kekuasaan yaitu sultan dan raja bukan dari para ulama, sedangkan secara bathin *siyasah* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari para pemegang kekuasaan.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Menurut seorang faqih dan hafidz yaitu Imam Al-Mawardi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*,
- b. *Siyasah Maliyyah*,
- c. *Siyasah Qadla'iyyah*, *Siyasah Harbiyyah*,
- d. *Siyasah 'Idariyyah*.

²³*Ibid*, h. 21.

Sedangkan menurut Ulama yakni Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah:

- a. *Siyasah Qadla'iyyah*,
- b. *Siyâsah `Idariyyah*,
- c. *Siyasah Maliyyah*,
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*.

Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu:²⁴

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.
- c. Lembaga yudikatif (*sultah Qada'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negarayang menjalankan kekuasaan kehakiman

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:²⁵

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan),

²⁴ Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM, 2(2).

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 15.

- b. *Siyasah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum),
- c. *Siyasah Qadlâ'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan),
- d. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter),
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara),
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional),
- g. *Siyasah Tanfîdziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang),
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).

3. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Hukum Islam

Keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.²⁶ Hal ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan, dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk

²⁶ *Ibid* .

menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.²⁷

B. Konsep *Siyasah Duturiyah*

1. Definisi *Siyasah Duturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Artinya, undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbcagai macam hubungan yang lain.²⁸ Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁹

Berdasarkan kajian konsep negara hukum tersebut, maka permasalahan di dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam

²⁷Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hal.33

²⁸ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm.40.

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁰

Menurut pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah* tersebut.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.³¹

Abul A’la al-Maududi menakrifkan *dustur* dengan: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.³²

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 47.

³¹ *Ibid*, h. 53.

³² *Ibid*, h. 52.

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi penyembah api). Setelah kata tersebut diserap kedalam bahasa Arab kata *dustur* pengertiannya berkembang menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³³

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁴

Berdasarkan dari berbagai pengertian tentang fiqh siyasah dusturiyah di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa fiqh *siy sah dusturiyy h* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyasah dusturiyyah* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah , Kontekstualisasi Doktrin....* h. 177-178.

³⁴ *Ibid*, h. 178.

kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁵

2. Ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasa* *dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* para ulama, meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyasah dusturiyah* dibagi dalam 4 macam yaitu:³⁶

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

³⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan ...*,h.73.

³⁶ *Ibid*, h. 48.

- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.³⁷

Fiqh siy saḥ dusturiyy h merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siy saḥ dusturiyy h* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁸ Secara umum *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Imamah

Secara etimologi, kata *imamah* pecahan dari *fi'il amma* (kata kerja). Jika dikatakan, *amma hum* atau *amma bihim*, maknanya yang terdepan dari mereka dan ia berarti *imamah*. Sedangkan imam bermakna, setiap yang diikuti dari golongan para pemimpin dan selainnya. Ibnu Manzhur berkata : imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh suatu kaum, baik berada di jalan yang lurus maupun berada di atas kesesatan.

Menegakkan imamah merupakan sebuah kewajiban besar di dalam agama, karena manusia itu membutuhkan persatuan, membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hal ini mustahil akan terwujud terkecuali

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin ...*h. 157-158.

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat...*,h.73.

jika ada seseorang yang mengatur dan memimpin saat melakukan sebuah pekerjaan atau sesuatu demi terwujudnya sebuah kemashlahatan dan mencegah timbulnya kemunkaran.

b. Rakyat dan Kewajibannya

Persoalan rakyat kelihatannya kurang mendapat pembahasan di kalangan para *fuqaha* terdahulu, misalnya Imam Mawardi dan Abu Ya'la tidak menyediakan satu bab yang khusus bagi membicarakan hal ini.³⁹ Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir *dzimmi* dan ada pula yang disebut *musta'min*. Kafir *dzimmi* adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya dan hartanya. Sedang *musta'min* adalah orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwanya, kehormatannya dan hartanya.

c. Bai'at (Janji Setia)

Bai'at (mubaya'ah), pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Diaudin Rais mengutip pendapat Ibnu Khaldun tentang *bai'at* ini dan menjelaskan: ⁴⁰Adalah mereka apabila *membai'atkan* seseorang *amir* dan mengikat perjanjian, mereka meletakkan tangan-tangan mereka di tangannya untuk

³⁹ Rusjdi Ali Muhammad, *Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 32.

⁴⁰ *Ibid*, h.100-101.

menguatkan perjanjian. Hal itu serupa dengan perbuatan si penjual dan si pembeli. Karena itu dinamakanlah dia *bai'at*.

3. Kedudukan *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *Siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara. Objek pembahasan *siyasah Dusturiyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas *syariat* yang bersifat universal. Atau objek kajian *fiqih siyasah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.⁴¹

⁴¹ Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta), hal.135

C. Perda Sebagai Produk *Ulil Amri*

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ulil amri* adalah pemimpin. Pemimpin merupakan tauladan atau contoh, motivator, inspirator dan membangunkan semangat bagi para pengikutnya untuk bergerak melangkah maju kedepan dengan hati, perbuatan serta pikirannya dalam meraih tujuan dan harapan serta cita-cita hidup yang lebih baik. Dalam membuat keputusan seorang pemimpin harus memperhatikan keadaan situasi sosial kelompok organisasinya, keputusan yang dibuat akan dirasakan bersama yang menjad tanggung jawab bersama pula dengan menjalankannya.

Semakin terbuka peluang bagi pemimpin untuk mewujudkan fungsi-fungsi kepemimpinan, sejalan dengan situasi yang dikembangkannya. Kenyataan para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Dengan demikian kepemimpinan adalah suatu proses dalam mempengaruhi orang lain agar dapat mencapai tujuan dari organisasi. Terapat juga yang mengatakan bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah hubungan interaksi antara pengikut (*follower*) dan pemimpin dalam mencapai tujuan.

Membahas tentang kepemimpinan sangat menarik dan diperhatikan oleh setiap orang, dalam membahas kepemimpinan sangat banyak masalah yang ada di dalam setiap organisasi di dalam lingkungan sekitar. Karena berhasil atau tidaknya suatu lembaga atau organisasi itu semuanya terletak

pada tipe dan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang menjalankan tanggung jawab dan tugas sebagaimana yang diamanahkan kepada pemimpin.

Persoalan kepemimpinan selalu memberikan perhatian untuk dibahas, tentang penjelasan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam setiap permasalahan yang ada didalam organisasi atau tauladan pada bawahannya. Pemimpin ialah seorang pribadi yang memiliki beberapa kelebihan yang dimiliki seperti memiliki kewibawaan pada dirinya, untuk mengarahkan dan membimbing bawahannya dan mampu mengarahkan bawahannya untuk kearah tujuan tertentu untuk tercapainya tujuan di sebuah organisasi yang dipimpinnya.⁴²

Dalam Al-Quran, istilah kepemimpinan sering dikenal dengan perkataan “*khalifah*” yang bermakna “*wakil*”. Yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat: 30. Yang artinya “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang *khalifah*”. Kemudian dalam istilah lain kepemimpinan juga dikenal dengan istilah sebutan “*imam*” yang memiliki arti pemuka agama dan pemimpin spiritual yang diteladani dan dijalankan fatwanya.⁴³

Dapat dipahami bahwa *ulil amri* adalah ulama yang menjadi pemimpin politik. Sehingga pada diri pemimpin terdapat kemampuan memahami agama dengan baik dan dapat melahirkan berbagai hukum yang sejalan dengan agama.⁴⁴

⁴²Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta : PT Grafindo Parsada), h.33.

⁴³Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang CV. Toha Putra, 1992), h.135-136.

⁴⁴Analiansyah 2014, *Ulil Amri dan Kekuatan Produk Huumnya*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Darussalam, Vol 21 No 2, h.270.

Ulil amri berasal dari dua kata yaitu *Ulil* dan *Amri*. *Ulil* berarti wali dan *Amri* berarti urusan-urusan. Secara *harfiah* *Ulil* berarti perwakilan urusan-urusan. Ada beberapa perbedaan pendapat yang mengatakan *ulil amri* adalah Ulama, pemimpin perang, sahabat-sahabat Rasulullah, Khulafaur rasyidin, ahli *fiqh* dan sebagainya. Perlu dijelaskan mengenai kekuatan produk *ulil amri* yang dimaksudkan adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Tidaklah mudah dalam pembuatan peraturan daerah karena pemahanan dan pengetahuan yang cukup sangat diperlukan dalam teknik pembentukan, sehingga Peraturan Daerah yang telah dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Berdasarkan UUD RI 1945 Pasal 1 Ayat (1) Neagara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang daerah provinsi nya dibagi atas kabupaten/kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Keberadaan peraturan daerah adalah penjabatan yang diberikan dengan memperhatikan kekuasaan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, karena terdapat bagian-bagian daerah yang lebih meneliti dan fokus diatur diurus dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.⁴⁵ Secara umum muatan materi dalam peraturan daerah adalah tentang rumah tangga daerah yang kaitannya dengan organisasi pemerintah daerah. Sementara itu yang berkaitan dengan pembantuan dan tugas yang merupakan produk hukum dari peraturan daerah merupakan legalitas dalam mendukung Pemerintah Provinsi sebagai otonom.

Selanjutnya penulis akan memperkenalkan hukum islam untuk menyentuh interpretasi *syariat*. Islam dan agama yang saling mengikat secara utuh maka penganutnya tidak dapat memisahkan dimensi material dan non-material dalam kehidupan manusia sendiri. Sehingga dalam *syariat* Islam atau hukum aturan yang muncul tidak hanya permasalahan terkait alam *ukhrawi* dan iman, bahkan sampai mengatur hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Sebagai pedoman seorang muslim Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama, setelah itu sunnah dan *ijtihad*. Oleh karena itu seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman maka ditemui masalah dalam kehidupan

⁴⁵Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, (PSH FH UII Yogyakarta, 2002), h.136.

umat manusia yang tidak didapati *lex-specialis*-nya dalam Al-Quran dan hadits, maka ditempuhlah melalui *ijtihad*.

Dalam peneapan konteks *syariat* Islam sangat erat berkaitan dengan penegak *syariat* yang diistilahkan dengan *Ulil Amri*. Allah SWT berfirman

dalam Q.S. an-Nisa/4:59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء : ٥٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa: 59).*⁴⁶

Ayat tersebut berkaitan dengan *ulil amri* yaitu memerintahkan kaum muslimin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang dalam menetapkan hukum, atau penguasa yakni jika mereka menyuruh agar menaati Allah dan rasul-Nya. Sehingga dapat dipahami dalam pembahasan di awal bahwa *ulil amri* sebagai pemerintah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

D. Islam dan Minuman Beralkohol

1. Jenis-jenis minuman beralkohol

Berdasarkan cara pembuatannya, jenis minuman beralkohol di dunia dibagi menjadi 3 jenis:

⁴⁶ QS. an-Nisa (4) : 59

a) Anggur (*Wine*)

Anggur (*Wine*) adalah minuman beralkohol yang dibuat dari berbagai jenis buah-buahan, seperti buah anggur, *peaches*, *plum* atau *apricots*, tetapi yang paling sering digunakan adalah anggur (*grapes*). Minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah lain yang kadar alkoholnya berkisar di antara 8% hingga 15% biasanya disebut sebagai wine buah (*fruit wine*). *Wine* dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur.⁴⁷ Ada beberapa jenis minuman anggur, yaitu:

- a. *Red Wine* dibuat dari anggur merah (*red grapes*)
- b. *White Wine* dibuat dari anggur putih (*white grapes*)
- c. *Rose Wine* adalah wine yang berwarna merah muda atau merah jambu yang dibuat dari anggur merah namun dengan proses ekstraksi warna yang lebih singkat dibandingkan dengan proses pembuatan *red wine*.
- d. *Sparkling Wine* mengandung cukup banyak gelembung karbon dioksida di dalamnya.
- e. *Sweet Wine* mengandung gula sisa hasil fermentasi (*residual sugar*) sehingga membuat rasanya menjadi manis.
- f. *Fortified Wine* mengandung alkohol lebih tinggi dibandingkan dengan wine biasa.

⁴⁷ Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h.23.

b) Bir

Bir merupakan minuman tertua yang dibuat manusia sejak sekitar 5000 SM yang tercatat di sejarah tertulis Mesir Kuno dan Mesopotamia, tak heran apabila penggemar minuman beralkohol yang bernama bir ini sudah mendunia bahkan sangat populer hingga diminati setelah air dan the.

c) Spirits

Spirits adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mendestilasi cairan yang telah terfermentasi sehingga dicapai kadar alkohol yang lebih tinggi. Minuman jenis spirits yang mempunyai kadar alkohol 95% disebut *everclear*. Spirits dapat dibuat

2. Minuman Beralkohol dalam Islam

Hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan sunnah memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia, terealisasinya kemaslahatan bertumpu pada terpeliharanya unsur pokok kehidupan manusia yaitu: agama, jiwa, akal, harga diri (keturunan) dan harta benda.⁴⁸

Sebagai salah satu unsur pokok untuk terpeliharanya seseorang dari beban masyarakat maka manusia diberikan akal agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik mengandung kejahatan atau penyakit bagi masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan kesadaran untuk mempertimbangkan baik-buruk perilaku dan manfaat-*mudharat* dari perbuatannya. Berkaitan dengan masalah tersebut maka pemeliharaan akal

⁴⁸ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978), h.200.

berhubungan dengan *khamr* khususnya berkaitan dengan sosial dalam masyarakat.

Khamr yang berasal dari bahasa arab berarti mendekati dan mencampuri.⁴⁹ *Khamr* juga berarti menutupi, sehingga *khamr* diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal. Pemahaman ini bersumber pada penjelasan Nabi saw bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah *khamr* dan pelanggaran. Satu ayat pertama diturunkan di Mekkah dan tiga ayat lainnya diturunkan di Madinah, pertama adalah turunnya ayat 67 surah An-Nahl, pada saat itu masyarakat Arab termasuk para sahabat masih mengkonsumsi minuman beralkohol dari bahan buah-buahan, selain itu juga diperjual belikan. Tahap ini meskipun telah dijelaskan adanya unsur memabukkan namun masyarakat pada saat itu tidak langsung menjauhi minuman beralkohol, mereka tetap mengkonsumsi karena masih merasa bahan yang ada dalam minuman tersebut adalah halal.

Surah an-Nahl ayat 67 sebagai berikut:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ (النحل : ٦٧)

Artinya: Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda

⁴⁹ Ibn Mandhur, *Lisan-Lisan Tadhīb Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 336.

(kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan (QS. An-Nahl: 67).⁵⁰

Kedua ayat 219 surah Al-Baqarah turun berkenaan dengan Umar bin Khattab, Muadh bin Jabal, dan golongan kaum Ansar yang meminta penjelasan kepada Rasul saw tentang *khamr* dan perjudian yang keduanya menimbulkan efek negatif berupa hilangnya kesadaran dan harta benda. Pada tahap ini barulah umat Islam dituntut menjauhi minuman beralkohol atau *khamr* karena melihat lebih banyak sisi negatifnya yang didapat apabila masih mengonsumsi *khamr*.

Turunnya ayat 219 surah Al-Baqarah, segolongan sahabat sudah tidak mau lagi mengonsumsi minuman beralkohol atau *khamr* berdosa. Sedangkan golongan lain masih tetap ada yang mengonsumsi *khamr*. Pada waktu jamaah shalat magrib, sebelum shalat, ‘Abd a;-Rahman bin ‘Awf emnundang para sahabat Nabi dalam jamuan makan minum *khamr*. Selesai jamuan, mereka melaksanakan shalat magrib berjamaah. Dari kesalahan yang cukup fatal itu maka turunlah ayat 43 surah An-Nisa.

Kesalahan itu terjadi akibat ketidaksadaran akal yang telah mempengaruhi yang merusak saraf otak. Pada tahap ini *khamr* sudah diharamkan ketika mendejati waktu shalat. Ini berarti bahwa secara logika para sahabat masih boleh mengonsumsi *khamr* jika jauh waktu shalat. Haram pada tahap ini belum mutlak sifatnya.

Dikalangan sahabat masih terdapat jamuan *khamr* dan terbiasa karena ketidakjelasan hukum *khamr*. Diriwayatkan muslimin pada saat itu

⁵⁰ QS. an-Nahl (16) : 67

pernah Sa'ad bin Abi Waqqas diajak golongan Muhajirin mengikuti jamuan makan dan minum *khamr* disuatu perkebunan. Ia ikut makan daging yang diolesi *khamr* dan minum *khamr*, akibatnya Sa'ad berbicara tanpa kontrol atau ngomel memanggil golongan Ansar dan Muhajirin dengan berkata “golongan Muhajirin lebih baik dari pada golongan Ansar”, mendengar perkataan ini seorang dari golongan Ansar mendekati dan memukul kepalanya hingga berdarah hidungnya. Setelah peristiwa Sa'ad maka dilaporkan kepada Rasul saw dan sebagai jawaban beliau mendapatkan wahyu ayat 90 surat Al-Maidah.

Dengan demikian minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk sehingga termasuk *khamr*. Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Ahnu*, Rasulullah SAW bersabda:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ
عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَرِيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ. (رواه مسلم)

Artinya: Telah bercerita Ishaq Ibnu Ibrahim dan Abu Bakar Ibnu Ishaq Kilahuma dari Rauhi Ibnu 'Ubadah telah bercerita Ibnu Juraij telah mengabarkan Musa Ibnu Uqbah dari Nafi'in dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Ahnu*, Rasulullah SAW bersabda Setiap hal yang memabukkan itu *khamr*, dan setiap yang memabukkan itu haram. (H.R. Muslim)⁵¹

⁵¹ H.R. Imam Muslim, dalam Shahih Muslim, Kitab Minuman, No (5337), Bab Setiap yang Memabukkan Adalah Arak, dan Setiap yang Memabukkan Adalah Haram. Juz 6, h. 100.

Hadis dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Telah bercerita Sahl telah bercerita Yazid Ibnu Harun dari Muhammad Ibnu Umar Ibnu Al-qomah dari Abi Salamah dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu adalah haram. (H.R. Ibnu Majah)⁵²*

Hadis di atas menegaskan bahwa mengonsumsi Minuman Beralkohol baik sedikit atau banyak tetaplah haram, sebab dasarnya adalah sudah jelas bahwa setiap yang memabukkan hukumnya haram untuk dikonsumsi.

Sumber pokok hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah. Manakal muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, maka Allah menurunkan ayat-ayat Alquran untuk menjelaskannya.⁵³ Dari beberapa tahapan tersebut, menjelaskan bahwa salah satu prinsip dasar yang sangat jelas memberlakukan hukum kaitannya dengan pelanggaran minuman beralkohol. Islam dalam hal ini sangat hati-hati dan pelan tapi pasti menjamin bahwa pelan atau lamban

⁵²H.R. Imam Ibnu Majjah, dalam Sunnan Ibnu Majjah, kitab Minuman, No (3515), Bab Setiap Hal yang Memabukkan itu *Khamr*, Juz 10, h. 306.

⁵³Duski 2013, *Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syathibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqrar Al-Ma'nawi)*, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, Vol. XI, No. 2, h.205.

denagn ketentuan hukum yang jelas, lebih baik cepat namun dengan hukum yang berantakan.

Diharamkannya minuman beralkohol merupakan hikmah yang diperoleh, karena minuman beralkohol adalah induk dari macam dosa serta mudharat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bagi kesehatan pun minuman beralkohol memiliki dampak negatif yaitu merusak organ-organ

3. Bahaya Minuman Beralkohol

Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebih dapat menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan dan mental seperti gangguan dalm fungsi merasakan, berfikir serta berperilaku. Adanya gangguan-gangguan tersebut akibat dari alkohol yang beraksi langsung kepada sel-sel saraf pusat. Seseorang yang sering mengonsumsi minuman beralkohol dengna takaran yang berlebih akan sampai pada dosis mabuk atau keracunan dan sering megalami gemetar, cemas, gelisah, murung dan berhalusinasi.⁵⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 bahwa mengonsumsi *kmar* atau minuman beralkohol akan lebih banyak mendapatkan sisi negatifnya dan dituntut untuk menjauhi minuman tersebut.

Surah Al-Baqarah ayat 219 berikut ini:

⁵⁴ Aminuddin, *Bahaya Minuman Beralkohol*, (Jakarta: Quarda, 2010),h.18.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْاَعْفَؤْ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (البقرة : ٢١٩)

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (QS. Al-Baqarah: 219).⁵⁵

Sebenarnya dampak dari mengonsumsi minuman beralkohol tidak hanya merusak akal dan jiwa, tetapi juga agama, keturunan dan harta benda. Dampak negatif pada agama adalah orang yang mengonsumsi minuman beralkohol menjadi tidak taat atau patuh akan agama misalnya pada perintah Allah serta enggan untuk mengerjakan shalat dan lain sebagainya. Termasuk menjadi tidak patuh untuk meninggalkan larangan Allah, karena dapat melakukan kejahatan-kejahatan dengan mudah. Dengan demikian maka dapat membahayakan keberlangsungan pelaksanaan *syariat* Islam.

Dampak negatif yang terjadi pada keturunan adalah apabila menjadi seorang pecandu, maka keturunan yang akan lahir menjadi lemah akalnya dan tidak menutup kemungkinan menjadi seorang yang memiliki karakter sama bahkan terlebih menjadi seorang pecandu dari sifat atau keturunan yang dimiliki orang tuanya. Hal ini terjadi karena apabila seorang suami melakukan hubungan suami istri dalam keadaan mabuk

⁵⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 219

maka berpengaruh kelak kepada keturunan yang kelak akan dilahirkan.

Sedangkan dampak negatif pada harta benda adalah maka keuangan yang dipakai tidak mendapatkan manfaat. Terlebih lagi apabila sudah menjadi pecandu, maka pengeluaran akan terus mengalir dan tidak sama sekali mendatangkan manfaat dapat mengalahkan kebutuhan yang prioritas lain. Tidak menutup kemungkinan seorang pecandu akan mencoba mengonsumsi narkoba, karena dari segi pergaulan biasanya pecandu berkaitan dengan barang haram lain. Dengan begitu apabila sudah terjadi peningkatan yang berawal dari pecandu minuman beralkohol kemudian menjadi pecandu narkoba maka pengeluaran akan semakin meningkat dan besar. Sementara penghasilan tidak seimbang maka akan muncul lagi kejahatan yang lain seperti kekerasan yaitu perampokan dengan tujuan untuk memenuhi kecanduan minuman beralkohol maupun narkoba. Dengan perlahan seorang pecandu merusak sendiri harga dirinya dengan perlahan tanpa disadari karena tidak memperhatikan dampak negatif akibat mengonsumsi minuman beralkohol yang akan membuat orang lain memiliki stigma negatif tentang pribadi si pecandu sehingga dalam pergaulan interaksi social akan diajuhi oleh orang lain.

4. Hikmah Pengharaman *Khamr*

Pengharaman *khamr* tidak secara langsung diharamkan namun bertahap, perlu diketahui bahwa dalam pengharamannya secara berangsur-angsur. Allah mengharamkan *khamr* karena *khamr* atau minuman beralkohol adalah budaya dari sejak jaman nenek moyang mereka, maka

akan sulit bagi mereka untuk menghilangkan kebiasaan yang sudah melekat di dalam diri budaya individu atau kelompok masyarakat secara langsung, hingga mengharamkannya menunggu hambanya siap.

Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang menjelaskan bahwa *khamr* adalah termasuk perbuatan syaitan, dan diperintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut supaya mendapatkan keberuntungan.

Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ (المائدة : ٩٠)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90).*⁵⁶

Hikmah diharamkan meminum minuman beralkohol adalah akan terjaganya keamanan, ketertiban sosial serta terhindarnya diri dari mental juga kesehatan karena hilangnya akal. Dengan menjauhi minuman beralkohol bermakna pula sebagai hikmah bahwa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah karena telah menjauhi larangannya, terhindar dari perbuatan tercela yang menghilangkan akal dapat membuat berlaku diluar kendali diri, terhindar dari zat yang membahayakan tubuh merusak organ dalam akibat minuman beralkohol dan akan terciptanya ketentraman masyarakat. Dengan melihat bahwa diharamkannya khamar kita dapat menengok hikmah yang di dapatkan pasalnya jika minuman tersebut memang benar

⁵⁶ QS. Al-Maidah (5) : 90

diharamkan untuk kemaslahatan manusia. Tidaklah Allah menurunkan hukum syariat nya untuk membantu hidup manusia dengan lebih baik yang salah satunya menghindari khamr. Dari sisi dunia alkohol atau *khamr* pun memiliki banyak sekali mudharat atau keburukan yang sebaiknya layak untuk ditinggalkan, karena akan sangat mungkin degan mengkonsumsi *khamr* menyebabkan kerusakan pada akal, gangguan yang ditimbulk akan merusak segala organ yang lain. Karena otak adalah oragn tubuh manusia yang paling penting, maka apabila sudah terjadi kerusakan pada otak efek yang dirimbulkan sangat fatal dan memicu terjadinya amnesia dan demensia.⁵⁷

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai minuman beralkohol khususnya terhadap pelaksanaan efektifitas Peraturan Daerah, ada beberapa penelitian yang mengangkat tentang minuman beralkohol, karena masih menjadi bahan yang menarik untuk diteliti. Namun penelitian yang membahas tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol berdasarkan analisis *siyasa* sendiri dapat dikatakan belum ada yang membahasnya. Beberapa penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Skirpsi karya Ilham Dwi Maryadi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Study Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012

⁵⁷ Tan Hoan Tjay, *Obat-Obatan Pernting Edisi Ketujuh*, (Jakarta : Gramedia), h.374.

Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)” di dalam skripsi ini menjelaskan tentang penegakan hukum dalam membrantas minuman beralkohol yang masih beredar. Penelitian ini menganalisa penegakan Perda terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan mengenai penelitian ini bahwa penegak hukum dalam hal ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda tentang minuman beralkohol. Aksi penertiban telah menjadi ancaman bagi para pelanggar khususnya pengedar maupun penjual terutama distributor. Kana tetapi, aksi penertiban yang dilakukan selama ini dan juga penjatuhan sanksi belum cukup membuat efek jera bagi pelanggar. Peran serta masyarakat dirasa masih kurang dalam hal penegakan hukum khususnya tentang peredaran minuman beralkohol.⁵⁸

Skripsi karya Muh. Wildan Fakhturi dalam skripsinya “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)” menjelaskan bahwa tidak adanya efek jera bagi para penjual atau pengepul dikarenakan adanya subsidi dari para produsen minuman keras, apabila tertangkap atau terjaring operasi pekat yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah maupun

⁵⁸Ilham Dwi Maryadi, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Study Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan , Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)” (*Skripsi* Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

kepolisian. Dalam hal ini tindak kriminalitas sebelum dan sesudah Perda masih belum efektif.⁵⁹

Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun persamaanya adalah penelitian yang dilakukan sama-sama membahas terkait mengenai minuman beralkohol, pembeda antara penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Fokus penelitian sangat berbeda
2. Bahasan substantif sangat berbeda, dimana penelitian terdahulu melihat pada tataran atau efektifitas perdagangan, sedangkan penulis pada ranah pelaksanaan atau implementasi
3. Objek kajian Peraturan Daerah pada peneltian terdahulu hanya ada dua kajian yakni larangan dan pengawasan sedangkan fokus Peraturan Daerah yang penulis teliti kajiannya pada pengawasan dan pengendalian.

Sehingga berdasarkan perbedaan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun sama-sama membahas atau meneliti minuman beralkohol tetapi muatan yang diteliti sangat bebrbeda.

⁵⁹Muh. Wildan Fakhturi, "EfektifitasPerda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)" (*Skripsi* Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur' n al-Kar m

Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Yogyakarta: CV Diponegoro. Cet. 5.

B. Hadist

H.R. Imam Muslim, dalam Shahih Muslim, Kitab Minuman, No (5337), Bab Setiap yang Memabukkan Adalah Arak, dan Setiap yang Memabukkan Adalah Haram. Juz 6, h. 100.

H.R. Imam Ibnu Majjah, dalam Sunnan Ibnu Majjah, kitab Minuman, No (3515), Bab Setiap Hal yang Memabukkan itu *Khamr*, Juz 10, h. 306.

C. Buku

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bandung, 2004, Cet.I.

Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwayt: Dar al-Qalam, 1978.

Abu Bakr Al-jazairi, *Ensiklopi Muslim*, Bekasi: Darul Fikr, 2017.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr Al-Islamiy (Jakarta:PT.Rineka Cipta)

Agus Ruswandi, *Al-Islami III*, Uninus Bandung, 2015.

Ahsin w. Alhafis, *fiqh Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Aminuddin, *Bahaya Minuman Beralkohol*, Jakarta: Quarda, 2010.

Aminudin, *Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan*, Jakarta: Quarda, 2010.

Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII Yogyakarta, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.

- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dr. Hasbi, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, Yogyakarta: PT Leukia Nouvalitera, 2019.
- Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT Grafindo Parsada.
- Lexy, John, Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Kosda, 2001.
- M. Hukmat, *Awas Dampak Narkoba Bagi Remaja, Waspadalah* Bandung: Gafitri, 2007.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, Edukasi Mitra Grafika, 2017.
- Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, Cet. 4.
- Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang CV. Toha Putra, 1992.
- Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Randi Muchariman, Helmi Al Djufri, *Siyasah Kebangsaan*, Purwokerto Jawa Tengah: Penulis Muda, 2016.
- Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-ma'rif 1997.
- Sayuti pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Tan Hoan Tjay, *Obat-Obatan Penting Edisi Ketujuh*, Jakarta : Gramedia.
- Wahyudin Achmad, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grasindo, 2009.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).

Wahbah zuhailly."Ushul Fiqh".kuliyat da'wah al Islami.(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) ,hlm. 89

D. Media Online

Akibat Pengaruh Minuman Keras Seorang Pemuda di Lampung Tengah mau Perkosa Nenek-nenek (tersedia di <https://www.google.com/amp/s/lampung.tribunnews.com/amp/2019/08/14/>, diakses pada 18 Januari 2020 pukul 13.06 WIB).

Mabuk Minuman Keras Seorang Anak di Lampung Tengah Tega Aniaya Ibu Kandung Hingga Dirawat di Rumah Sakit (tersedia di <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/13/> 18 Januari 2020 pukul 13.45 WIB).

E. Sumber dari Jurnal dan Skripsi

Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2(1), 47-63.

Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 2(2)

Mutasir, M. (2020). NON MUSLIM SEBAGAI MENTERI TANFIDZI PERSFEKTIF PEMIKIRAN AL-MAWARDI. *An-Nida'*, 42(2), 1-20.

Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qurâ€™ an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 373-394.

Ilham Dwi Maryadi, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Study Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan , Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)" (*Skripsi* Fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Muh. Wildan Fakhturi, "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Atas Perda Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)" (*Skripsi* Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

F. Perundang Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

